

GERAKAN INTELEKTUAL PETANI MELALUI ORGANISASI WARTANI DESA CURAHNONGKO, KABUPATEN JEMBER

Nurul Hidayat

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Jawa Timur

dayat1497@gmail.com

Abstrak

Perjuangan petani di Desa Curahnongko, Kabupaten Jember untuk mendapatkan haknya atas tanah telah melalui beragam dinamika. Konflik yang melibatkan petani dan PTPN XII Kalisanen telah dimulai sejak 1966. Konflik dipicu oleh penyerobotan tanah oleh PTPN Kalisanen pada masa itu. Petani yang telah lama mengelola lahan tersebut untuk dijadikan media pertanian merasa kehilangan, sehingga tahun-tahun berikutnya terjadi protes-protes untuk menuntut lahan miliknya. Protes-protes petani meningkat seiring dengan lengsernya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Pada tahun tersebut menjadi titik balik dari petani untuk kembali menyuarakan secara terbuka agar tanah yang mereka miliki dikembalikan. Gelombang-gelombang protes yang tak kunjung berhenti memancing intelektual untuk ikut bergabung dalam arena perjuangan. Aktor intelektual tersebut selanjutnya membentuk organisasi untuk dijadikan sebuah wadah yang menampung keresahan petani dan memperjuangkannya secara bersama-sama. Wadah atau organisasi tersebut dinamakan WARTANI (Wadah Aspirasi Warga Tani). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe etnografi. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan tiga komponen, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu, 1) WARTANI memainkan peran penting dalam arena konflik yang terjadi dengan PTPN. 2) peran intelektual telah meningkatkan pengetahuan petani dan mentalitas mereka dalam perjuangan hak atas tanah. 3) peran intelektual turut membantu organisasi dalam berjejaring secara politik dengan pemerintahan.

Kata kunci: WARTANI, intelektual, perang posisi, PTPN

FARMERS INTELLECTUAL MOVEMENT THROUGH THE WARTANI ORGANIZATION OF CURAHNONGKO VILLAGE, JEMBER REGENCY

Abstract

The struggle of farmers in Curahnongko Village, Jember Regency to get their rights to land has gone through various dynamics. The conflict involving farmers and PTPN XII Kalisanen has been started since 1966. The conflict was triggered by land grabbing by PTPN Kalisanen at that time. Farmers who have long managed the land to be used as agricultural media feel lost, so that in the following years there were protests to claim their land. Peasants' protests increased with the fall of the New Order government in 1998. That year was a turning point for farmers to speak openly again for the return of their land. The waves of protests that never cease to provoke intellectuals to join in the arena of struggle. The intellectual actor then formed an organization to be used as a forum to accommodate farmers' concerns and fight for it together. The forum or organization is called WARTANI (Wadah Aspirasi Warga Tani). This study uses a qualitative method of ethnographic type. The data collection carried out in this study used three components, observation, interviews and documentation. The results of this study are divided into three, namely, 1) WARTANI plays an important role in the arena of conflict that occurs with PTPN. 2) the role of intellectuals has increased the knowledge of farmers and their mentality in the struggle for land rights. 3) the role of intellectuals in helping organizations in political networking with the government.

Keywords: WARTANI, intellectual, position war, PTPN

Pendahuluan

Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Melalui tanah masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan melalui sektor pertanian. Selain itu, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi melainkan juga tanah dapat bernilai sosial politis bagi pemilikinya. Kepemilikan tanah oleh masyarakat digunakan oleh mereka dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tanah sebagai sumber daya yang penting menempatkannya pada posisi yang strategis dalam pembangunan bangsa dan negara. Lebih daripada itu, kepemilikan tanah yang luas dapat menjadikan seseorang dipandang sebagai individu mapan dan makmur. Melalui sudut pandang dari petani melihat tanah tidak hanya sebagai faktor produksi saja, namun juga tanah dipandang sebagai bentuk ikatan sosial antara para petani (Zein, 2019).

Desa Curahnongko memiliki jarak 40 Km dari kota Jember sehingga termasuk dalam daerah yang terisolasi sejak masa kolonial desa Curahnongko merupakan salah satu daerah yang didominasi hutan sehingga masyarakatnya memiliki pekerjaan sebagai petani maupun buruh tani (Aprianto, 2016). Tanah yang dibuka sebagai perkebunan awalnya dibuka pada masa pemerintahan Belanda. Pemerintah Belanda menjadikan lahan tersebut sebagai perkebunan guna sebagai produksi komoditas kopi pada masa itu. Harga ekspor kopi yang begitu tinggi memotivasi mereka untuk memperbanyak lahan-lahan perkebunan sebagai media tanam komoditas itu. Lahan di Curahnongko menjadi objek selanjutnya yang digunakan pemerintah kolonial Belanda untuk dijadikan perkebunan. Lahan-lahan yang telah dijadikan perkebunan oleh Belanda biasa disebut dengan Hak *Erfpacht*. Tanah-tanah ini yang kemudian hari dibagikan kepada petani berdasarkan perintah dari kolonial Jepang. Mereka memerintahkan kepada petani untuk mengelola lahan tersebut. Rakyat dengan senang hati mengelola lahan yang telah diberikan pada masa pemerintahan Jepang. Mereka mengelola lahan tersebut sebagai lahan pertanian.

Setelah masa pendudukan kolonial berakhir tanah bekas jajahan dikembalikan kepada rakyat. Rakyat sebelumnya telah membuka hutan mengakuisisi lahan mereka masing-masing dengan dasar hak guna yang telah diberikan pada masa nasionalisasi lahan tahun 1959. Rakyat kemudian mengolah lahan tersebut menjadi lahan pertanian dengan didominasi oleh tanaman pangan. Namun lahan yang digunakan oleh petani tidak diakui oleh negara karena tidak disertai dengan alat bukti yang sah berupa hak penguasaan sehingga pada akhirnya menjadi pemicu dalam sengketa antara petani desa Curahnongko dengan pihak PTPN Kalisanen. Perjuangan petani Curahnongko dalam memperebutkan lahan dengan pihak PTPN Kalisanen telah berlangsung sejak masa Orde Baru yaitu pada tahun 1966. Negara menjalankan kebijakan nasionalisasi aset berupa pabrik dan perkebunan milik kolonial untuk dilakukan penguasaan dan pengelolaan. Perebutan terjadi karena adanya perbedaan klaim dalam hak milik suatu lahan antara PTPN Kalisanen dan petani desa Curahnongko tidak pernah menemui titik terang hingga puncaknya menimbulkan konflik. Masyarakat yang merasa kehilangan atas hilangnya sumber daya pendapatannya tersebut menjadi latar belakang dari munculnya gerakan sosial dikemudian hari. Gerakan sosial yang muncul sebagai respon atas hilangnya sumber pendapatan mereka menurut Morison disebut sebagai deprivasi relatif (Sukmana, 2016).

Perjuangan yang telah berlangsung sejak lama ini telah membawa perubahan pada pola gerakan yang dibawa oleh petani. Pada masa awal reformasi petani memperjuangkan tanahnya secara individu, kemudian berkembang dengan mengikuti Organisasi Tani Lokal (OTL). Petani Curahnongko juga pernah mendapatkan pendampingan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Seiring berjalannya waktu petani mulai belajar dan secara mandiri membentuk

organisasi perjuangan kedaerahan bernama Wadah Aspirasi Warga Tani (WARTANI). WARTANI didirikan oleh petani desa Curahnongko pada tahun 2013. Petani membentuk organisasi ini dengan tujuan sebagai wadah dalam gerakan massa. WARTANI sebagai sebuah organisasi yang melakukan mobilisasi petani Desa Curahnongko memainkan peran penting dalam memperebutkan lahan dengan pihak PTPN Kalisanen. Mereka secara konsisten memperjuangkan lahannya dengan melakukan gerakan berupa demonstrasi di gedung DPRD, pemerintah Kabupaten Jember hingga ke tingkat nasional.

Perjuangan tanah yang dilakukan petani mengundang intelektual dalam membantu jalannya perjuangan tanah oleh petani Desa Curahnongko. Pak Yatani sebagai intelektual menjadi aktor penting dalam terbentuknya organisasi WARTANI. Melalui Pak Yatani organisasi-organisasi yang memiliki fokus pada agraria perlahan-lahan mulai memasuki arena konflik PTPN Kalisanen dan petani. Selain itu, Pak Yatani yang memiliki keterkaitan dengan partai politik PDIP memiliki andil besar pada keberlangsungan perjuangan. Peran dari Pak Yatani ini turut mengubah arah perjuangan petani yang awalnya dilakukan protes secara langsung berangsur berubah menjadi lebih demokratis.

Gerakan yang dilakukan petani tidak secara tiba-tiba mampu berkembang menjadi gerakan massa yang masif. Hal ini dikarenakan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh petani membutuhkan pengetahuan yang didapatkan melalui pembelajaran maupun pengalaman sehari-hari. Melalui pengetahuan itulah gerakan-gerakan petani mengalami perkembangan sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Pengetahuan itulah yang pada akhirnya menjadikan individu petani sebagai seorang intelektual. Intelektual baru memiliki peran penting dalam membawa hasil yang diharapkan oleh petani. Hal inilah yang menjadi objek penelitian untuk melihat peran intelektual dalam gerakan perlawanan petani sebagai hal unik dan patut digali secara mendalam.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif tipe etnografi. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan pada penelitian ini ialah *sample purposeful*. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terbagi menjadi tiga komponen yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data milik Huberman yaitu, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

a. Gambaran umum Desa Curahnongko

Desa Curahnongko terletak di Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Desa ini terbentuk pada tahun 1918. Pada mulanya Desa Curahnongko merupakan wilayah hutan yang begitu luas sebelum akhirnya dibabat oleh masyarakat. Orang yang pertama kali melakukan pembabatan hutan di wilayah Desa Curahnongko adalah Pak Yah dan Pak Truno pada tahun 1917. Mereka membabat hutan guna dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Desa Curahnongko merupakan daerah yang subur dikarenakan memiliki letak geografis berupa lembah-lembah dengan wilayah luas. Desa Curahnongko terletak 425 meter di atas permukaan laut sehingga tak mengherankan apabila termasuk pada wilayah yang subur. Wilayah Desa Curahnongko adalah 283,89 km². Selain itu, Desa Curahnongko memiliki batas – batas dengan wilayah lain. Sebelah utara desa

berbatasan dengan Desa Wonoasri. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Andongrejo. Sebelah selatan berbatasan dengan hutan dan Taman Nasional Meru Betiri. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu.

Desa Curahnongko didominasi dengan pekerjaan penduduk sebagai petani. Angka yang ditunjukkan oleh BPS Jember tahun 2019 sebanyak 457 penduduk bekerja sebagai petani, disusul pekerjaan angkutan sebanyak 216 penduduk, 165 penduduk bekerja di sektor perdagangan dan 160 penduduk bekerja di sektor konstruksi. Dominasi pekerjaan petani tidak terlepas dari kondisi geografis Desa Curahnongko yang berada di dataran lembah. Wilayah Curahnongko juga diapit oleh pegunungan sekaligus merupakan wilayah dari Taman Nasional Meru Betiri.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019

Pekerjaan	Jumlah
Petani	457
Pengrajin	18
Konstruksi	160
Perdagangan	165
Angkutan	216
Lain – lain	152
Total	1268

Sumber: BPS Kab. Jember

Masyarakat Desa Curahnongko memiliki keberagaman yang khas. Dalam masyarakat Desa Curahnongko penduduknya memiliki struktur masyarakatnya yang unik. Struktur masyarakat Desa Curahnongko dapat dilihat melalui dua sudut pandang yaitu, secara horizontal dan vertikal. Struktur masyarakat Curahnongko secara horizontal tersusun dalam dua kebudayaan; budaya Jawa dan Madura. Struktur masyarakat Curahnongko dapat dilihat secara vertikal yaitu, petani dan buruh tani. Pada struktur masyarakat Curahnongko ini terlihat pada kepemilikan tanah. Jumlah penduduk tidak seimbang dengan jumlah lahan yang dibutuhkan mengharuskan mereka melakukan apapun sebagai upaya memenuhi kebutuhannya. Orang-orang yang memiliki lahan akan menggarap lahannya dengan dibantu oleh penduduk lainnya ketika masa panen. Namun, ketika menunggu masa panen petani-petani tersebut akan menjadi buruh tani apabila seseorang sedang membutuhkan bantuannya.

b. Sejarah lahan

Sengketa tanah di Curahnongko telah lama terjadi. Persengketaan telah terjadi mulai tahun 1966 hingga sekarang. Sengketa tanah yang terjadi di Desa Curahnongko melibatkan dua pihak yaitu penduduk Desa Curahnongko dan PTPN XII Kalisanen. Sengketa tanah terjadi setelah adanya penyerobotan tanah secara paksa yang dilakukan oleh PTPN XII Kalisanen. Masyarakat dipaksa untuk meninggalkan lahan yang telah mereka olah sejak tahun 1942 dengan ancaman disiksa hingga dibunuh. Tanah yang menjadi sengketa antara petani dan PTPN Kalisanen sebenarnya merupakan lahan yang diberikan pada masa pendudukan Jepang. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat bahwa tanah tersebut telah diberikan sejak tahun 1942. Tanah tersebut diberikan kepada rakyat dengan syarat tidak diperjual belikan. Masyarakat kemudian melakukan penanaman kebutuhan pokok sehari-hari. Penanaman terus dilakukan meskipun masa pendudukan Jepang berakhir pada tanggal 15 Agustus 1945.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari WARTANI, pada masa kemerdekaan masyarakat tepatnya pada tanggal 14 April 1958 masyarakat memperoleh pengakuan dari negara berbentuk surat laporan pemakaian tanah yang dibuktikan dengan pemakaian tanah oleh masyarakat. Namun, ini tidak bertahan lama selang waktu 8 tahun Indonesia mengalami gejolak politik dengan berakhirnya masa pemerintahan Soekarno yang digantikan oleh Soeharto. Penyerobotan lahan dilakukan setelah adanya izin dari kepala desa saat itu Pak Djapar Sidodjoyo. Pak Djapar merupakan Kepala Desa Curahnongko sejak tahun 1930 hingga tahun 1965. Keterlibatan kepala desa ini diungkapkan oleh Pak Tukirin:

“biyen onok le izin dari biyen iku sopo yo. Oh iya Pak Djapar. Kan kalau dulu itu bukan lagi izin tapi memang atas perintah dari negara”.

“dulu ada izin nak, dulu itu dari siapa ya. Oh iya Pak Djapar. Kan kalau dulu itu bukan lagi izin tapi memang atas perintah dari negara”. (wawancara 26 Mei 2022)

Masyarakat yang masih tetap bersikeras untuk tetap tinggal di lahan, mereka akan dituduh sebagai PKI dan negara tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan dan pembunuhan. Masyarakat pun ketakutan dan memilih untuk meninggalkan lahan mereka. Masyarakat pindah ke suatu wilayah dan melakukan pembukaan lahan untuk dijadikan permukiman. Tindakan intimidasi yang dilakukan negara tidak berhenti sampai disitu. Mereka terus melakukan patroli pada penduduk-penduduk yang masih melawan. Ketakutan petani kepada tentara membuat mereka lari tunggang langgang menuju pegunungan yang sekarang masuk dalam wilayah Desa Adongrejo, bukit itu dikenal dengan *wedhus melet*. Penduduk menamakan bukit tersebut dengan melihat bahwa pengejaran yang dilakukan oleh para tentara hingga ke pegunungan membuat penduduk merasa letih hingga menjulurkan lidahnya. Pada masa ini kehidupan petani sengsara, mereka hanya bisa makan *pala pendhem* atau umbi-umbian dan tidak mampu melakukan aktivitas pertanian seperti sedia kala. Penduduk pun tidak mempunyai pilihan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan memilih untuk bekerja menjadi buruh PTPN. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Riono:

“Begini masyarakat itu diintimidasi. Bahasanya begini ini lahan mau dimanfaatkan oleh PTPN dengan bantuan pemerintah kalau masih bertahan berarti statusnya anggota PKI, disuruh minggir kayak gitu. Kalau ngga minggir malah ditumpas”. (26 November 2021)

Hal serupa juga diungkapkan oleh sekretaris desa. Sekretaris desa saat itu bernama Pak Soekirno. Dalam pernyataannya bahwa desa mengakui lahan yang sedang disengketakan merupakan milik petani. Selain itu, dalam pernyataannya Pak Soekirno juga menyatakan bahwa lahan-lahan yang direbut oleh PTPN merupakan lahan milik orang-orang yang dicurigai sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI)/Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat atau SARBUPRI dan sebagian anggota dari PNI dan NU. Dua organisasi terakhir masih diperbolehkan memiliki tanah seluas ¼ bau. Perebutan tanah oleh perkebunan Wonowiri pada tahun 1965 disaksikan oleh Tritunggal saat itu, Dan ramil Bapak Soedrapto, Dan Polsek Bapak Mochwan dan Camat Tempurejo Bapak S.P. Kusumo. Pernyataan ini dibuat pada tahun 1998.

Bentuk protes yang dilakukan petani secara diam-diam berlangsung hingga tahun 1996. Aksi ini dilakukan oleh petani dengan melakukan penebangan pohon karet

pada malam hari. Pengerusakan ini membuahkan hasil pada tahun 1982 yang bertepatan dengan pemberian lahan yang akan diberikan PTPN. Bahkan pada tahun ini saja juga masih terdapat pengerusakan. Pengerusakan sempat berhenti setelah dua tahun pemberian tanah seluas 25 hektar yang diberikan oleh PTPN. Namun, tanah yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan permohonan petani yaitu seluas 357 hektar. Ketidaksesuaian ini memicu amarah rakyat sehingga mereka kembali melakukan pengerusakan. Pengerusakan kembali terjadi setelah dua tahun berselang tepatnya terjadi tahun 1984.

Aksi ini mulai berkurang setelah adanya niat baik yang diberikan oleh PTPN kepada petani pada tahun 1999. PTPN memberikan program kemitraan kepada petani yang didalamnya berisi tentang pengerjaan lahan dengan syarat pohon-pohon karet masih muda atau yang disebut dengan tumpang-sari. Ketika melakukan peremajaan petani memanfaatkan momen ini untuk melakukan pendudukan lahan. Mereka merobohkan pohon-pohon karet yang masih muda. Pohon-pohon yang dirobohkan ke tanaman palawija petani. Satu per satu pohon mulai berjatuh hingga total yang berjatuh seluas 125 hektar. Penebangan ini tidak dilakukan secara semena-mena. Petani terlebih dahulu memetakan lahan mana saja yang menjadi sengketa. Setelah benar-benar yakin bahwa lahan tersebut dulunya merupakan milik petani, mereka lalu melakukan penebangan pohon karet muda di lahan PTPN.

Kegiatan yang dilakukan pada rentang waktu ini tahun 2000-2010 adalah menghadiri beberapa pertemuan yang dilakukan oleh BPN, DPRD dan pemerintah Kabupaten Jember. Kehadiran dari petani ke instansi-instansi itu membuahkan hasil dengan adanya perjanjian pada tahun 2005 yang melibatkan dua pihak antara perkebunan Kalisanen dan petani penggarap dengan dua syarat:

1. Untuk petak yang diklaim namun belum digarap kedua belah pihak sama-sama tidak boleh menggarap
2. Petani tidak boleh mengganggu tanah PTPN XII Kalisanen dan sebaliknya PTPN XII tidak boleh mengganggu tanah di petak perjuangan.

c. Dinamika perjuangan

Petani menurut Wolf (dalam Yuswadi, 2005) adalah orang-orang pedesaan yang melakukan cocok tanam di desa, mereka memiliki perbedaan dengan pengusaha pertanian terletak pada pengelolaan usaha tani sebagai suatu perusahaan bisnis. Bernstein juga menjelaskan petani dengan membaginya menjadi tiga yaitu, petani miskin, petani menengah dan petani kaya. Petani miskin merupakan orang yang mengelola lahan pertanian yang bukan miliknya demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Petani menengah adalah orang yang memiliki tanah dan dapat mengelolanya. Petani kaya adalah orang yang memiliki lahan pertanian yang digunakan dalam mengakumulasi kepemilikan alat produksi dengan tujuan bisnis pertanian (dalam Yuswadi, 2005).

Petani masih diliputi rasa cemas karena tentara masih sering berpatroli di area sekitar Desa Curahnongko. Mereka mengawasi gerak-gerik yang mencurigakan dari petani. Pada tahun 1970-an mereka melakukan gerakan secara diam-diam. Gerakan yang dilakukan masyarakat dalam merespon tindakan semena-mena PTPN adalah mengirimkan surat sebaran berisi tanah itu harus dikembalikan pada rakyat. Surat-surat itu dikirimkan pada bupati melalui kepala desa. Mereka begitu berharap adanya bantuan dari pihak kepala desa untuk menyelesaikan sengketa tanah dengan PTPN.

Namun apa daya mereka kepala desa pada masa pemerintahan Orde Baru sangat tunduk dengan presiden apabila diketahui mereka melakukan pembelaan kepada petani tindakan pemecatan akan segera diambil.

Pada tahun 1977 mulai terjadi gerakan perlawanan dengan melakukan penebangan pohon karet muda di area PTPN Kalisanen. Aktivitas ini dilakukan setelah Magrib hingga subuh. Waktu itu dipilih dengan dasar bahwa pada saat itu pengawasan yang dilakukan oleh PTPN Kalisanen sangat renggang sehingga akan lebih mudah dan aman. Mereka tidak melakukan pengerusakan secara semena-mena namun hanya di area yang memang dahulunya merupakan milik petani. Dalam sehari mereka bisa melakukan pengerusakan sebanyak 100 hingga 200 pohon karet muda. Aktivitas ini akan dilakukan secara terus-menerus dengan batasan tanpa ada tindakan tegas dari PTPN. Pengerusakan ini bertahan hingga tahun 1982 yang bertepatan dengan pemberian lahan yang akan diberikan PTPN. Bahkan pada tahun ini saja juga masih terdapat pengerusakan. Pengerusakan sempat berhenti setelah dua tahun pemberian tanah seluas 25 hektar yang diberikan oleh PTPN. Namun, tanah yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan permohonan petani yaitu seluas 357 hektar. Ketidaksesuaian ini memicu amarah rakyat sehingga mereka kembali melakukan pengerusakan. Pengerusakan kembali terjadi setelah dua tahun berselang tepatnya terjadi tahun 1984.

Pola perlawanan yang dilakukan petani pada masa ini adalah dengan diam-diam. Petani merasa bahwa melakukan perlawanan langsung dengan pihak PTPN akan sangat beresiko sehingga perlawanan dilakukan dengan hati-hati. Perlawanan yang dilakukan oleh petani ini oleh Scott disebut sebagai perlawanan sehari-hari. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh petani ini dilakukan tanpa perlu melakukan koordinasi.

Kejadian ini memperlihatkan bahwa PTPN mempunyai kekuatan dalam segi militer untuk dapat melakukan sebuah tindakan kekerasan kepada rakyat. Tindakan yang dilakukan PTPN dalam melakukan represi kepada rakyat merupakan sebuah bentuk defensif mereka dalam upaya mempertahankan kekuasaan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Gramsci bahwa partai Moderat di Italia mempunyai sebuah kendali lebih dari sebuah partai yaitu, tentang militer dan politik. Mereka berupaya melakukan perebutan kekuasaan dengan lebih mengandalkan kekuatan-kekuatan borjuis tanpa sedikitpun melibatkan kelompok sosial lain. Apabila diterapkan dalam kondisi yang dialami oleh petani Desa Curahnongko bahwa PTPN merupakan jelmaan dari Partai Moderat Italia. PTPN sendiri merupakan BUMN yang di dalamnya berkuat dengan kepentingan-kepentingan para pengusaha atau borjuis.

PTPN berusaha menanamkan konstruk pada pemikiran petani bahwa perjuangan akan berakhir sia-sia. Upaya-upaya yang dilakukan PTPN serupa dengan yang dijelaskan oleh Gramsci tentang hegemoninya. Dalam penjelasan Gramsci tentang hegemoni miliknya bahwa penguasaan atau dominasi pada kelas-kelas dibawahnya dilakukan dengan cara melakukan konsesus. Dalam kerangka berpikir seperti itu jelaslah dikatakan bahwa PTPN berusaha menanamkan secara “paksa” kepada petani bahwa mereka tidak akan sanggup untuk merebut kembali tanah nenek moyangnya. Ketakutan-ketakutan yang diberikan oleh tentara kepada petani berujung pada kesukaran atau keengganan mereka dalam melakukan gerakan.

Setelah masa kepemimpinan Pak Soeharto selesai, setelah adanya demonstrasi dari masyarakat dimulailah era kebebasan. Era dimulainya kebebasan dalam

berekspresi. Demonstrasi di Curahnongko sendiri meletus pada tahun 1999 aksi pembakaran terjadi hingga tahun 2000. Pada tahun 1999 petani melakukan aksi pembakaran sebagai protes kepada PTPN untuk mengembalikan tanahnya. Pembakaran terjadi di lahan PTPN yang telah diklaim oleh petani seluas 125 hektar. Setelah lengsernya Presiden Soeharto, gerakan menjadi begitu massif sehingga terpikirkan oleh mereka untuk membentuk organisasi. Adanya organisasi memudahkan mereka dalam mengorganisir massa. Pasca pembentukan organisasi ini perlawanan yang dilakukan petani semakin massif ditandai dengan beberapa aksi pada tahun 1999 hingga 2000.

Perjuangan petani mendapatkan banyak rintangan yang kali ini diberikan langsung dari PTPN. Organisasi baru yang didirikan oleh pihak PTPN yang bernama Forum Komunikasi Warga Perjuangan Curahnongko atau FKWPC. Pembentukan organisasi ini digunakan sebagai tandingan dari organisasi SIPER. Pembentukan organisasi ini tidak lain ditunjukkan sebagai penarik perhatian masyarakat agar lebih mementingkan kebutuhan ekonominya daripada perjuangan tanah.

Pada tahun 2010 suasana kembali memanas. Hal ini dikarenakan adanya keputusan yang diberikan oleh PTPN kepada petani secara sepihak. Juma'in sebagai perwakilan petani lantas melakukan perjanjian dengan PTPN pada tahun 2010. Perjanjian ini membahas tentang pelepasan tanah seluas 125 hektar. Para petani pun sempat kaget dengan diputuskannya hasil tersebut. Setelah dikeluarkannya keputusan tersebut petani semakin marah dengan PTPN dan salah satu oknum di SIPER. Ketidakuasan petani berujung pada keluarnya sebagian anggota SIPER dari organisasi. Salah satu dari petani yang keluar ialah Pak Yateni. Setelah memutuskan keluar Pak Yateni bersama petani-petani lain berkumpul dan mendirikan WARTANI pada tahun 2012. Namun, mereka tidak merasa *jumawa* setelah mendirikan organisasi baru. Pak Yateni masih menunggu saat momen yang tepat untuk melakukan deklarasi pendirian. Pak Yateni sendiri merupakan ketua organisasi dengan dibantu oleh Pak Tukirin selaku sekretaris dan Pak Riono sebagai bendaharanya.

PTPN mempunyai kekuatan selain militer yaitu, kekuatan politik. Dalam upaya untuk melakukan suatu bentuk hegemoni dari atas ke bawah negara menjalankan fungsinya dalam politik. Artinya, negara tidak hanya menanamkan suatu bentuk pemikiran secara paksa kepada rakyatnya saja melainkan juga berupaya menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok yang diakui rakyat. PTPN berusaha untuk menjalin hubungan politik dengan pihak-pihak yang berpengaruh di kalangan petani. Mereka berupaya untuk menyelesaikan perkara dengan petani melalui metode-metode yang lebih halus daripada melakukan serangan-serangan kekerasan. Hal ini agar permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak segera terselesaikan. PTPN mencoba untuk melakukan komunikasi dengan perwakilan petani agar disetujuinya lahan seluas 125 hektar.

Pada tahun 2013 SIPER melakukan aksi di pemerintah Kabupaten Jember dengan tuntutan menolak adanya tuduhan kriminalisasi. Aksi ini diawali dengan adanya protes yang dilayangkan oleh petani Desa Curahnongko. Mereka melakukan protes setelah diketahui adanya aksi pemerasan kepada petani yang dilakukan oleh oknum SIPER. Mereka menjelaskan bahwa petani akan diberikan surat hak milik atas tanah dengan luas 18X100 meter. Biaya yang harus dikeluarkan petani untuk mendapatkan sertifikat tanah pun tidak murah mereka harus mengeluarkan dana sebesar 500 ribu

hingga belasan juta. Dalam sumber yang sama majalah-gempur.com dikatakan bahwa tanah yang dimiliki dipinjamkan sebagai biaya untuk keberangkatan ke Jakarta.

Organisasi SIPER seperti mati suri seolah tidak ada namun sebenarnya masih berdiri. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya surat dari Kepala Desa Curahnongko yaitu Pak Suroso pada bulan Agustus 2014. Surat ini ditunjukkan kepada DPRD Jember yang berisi tentang dukungan dan pengakuannya kepada WARTANI bahwa organisasi tersebut adalah asli dari warga Desa Curahnongko. Legitimasi ini menjadikan posisi SIPER semakin terpinggirkan dari arena perjuangan tanah. Hal ini diperparah dengan dikembalikannya berkas dari SIPER saat pengajuan tanah ke BPN Pusat. Surat yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2013 berisi tentang rincian biaya dan ketidaklengkapan berkas yang diberikan oleh SIPER.

Pendirian WARTANI tidak membuat jalannya perjuangan menjadi mulus banyak halangan yang kian banyak terjadi. PTPN mendirikan organisasi kemitraan bernama Forum Komunikasi Perjuangan Tanah atau disingkat FKPT. Pembentukan ini didirikan dengan tujuan menjalin kerja sama antara petani dan PTPN. Perjalanan organisasi ini tidak diterima dengan baik sehingga anggota yang bergabung hanya belasan orang saja.

Gerakan SIPER cenderung mandeg setelah tahun 2013, justru bertentangan dengan yang dilakukan oleh WARTANI. Gerakan demi gerakan dilakukan oleh WARTANI mulai dari aksi demonstrasi hingga berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam sengketa tanah. WARTANI mencoba untuk berjejaring dengan tokoh pemerintahan nasional untuk turut membantu penyelesaian sengketa tanah yang telah lama terjadi. Demonstrasi pada tanggal 15 April 2016. Aksi ini ditunjukkan agar pemerintah segera menindaklanjuti apa yang telah dilakukan oleh WARTANI. Menurut sumber news.detik.com bahwa WARTANI juga menuntut agar pemerintah segera membentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Pembentukan tim ini sebelumnya telah diajukan pada tahun 2014 namun hingga tahun 2016 masih belum dilakukan. Melalui demo ini juga dimulainya kedekatan WARTANI dengan Sekretariat Nasional Jokowi (SEKNAS). SEKNAS juga menyetujui tuntutan yang diberikan kepada pemerintah Jember dan nantinya akan mendampingi petani agar segera mendapatkan tanah mereka kembali. Pada tahun yang sama tepatnya 10 Januari 2017 WARTANI mendirikan aliansi yang tergabung dalam proses penyelesaian sengketa tanah. Pada aliansi ini tergabung diantaranya adalah, DPK Jember Keluarga Marhaen, WARTANI, SEKNAS Jokowi, Komisariat Sastra GMNI, Kantor BPN Jember dan Komite Sentral GMNI.

SIPER yang mulai terdesak dengan gerakan WARTANI mencoba untuk mencari jaringan untuk memperkuat posisi mereka di mata petani khususnya anggotanya. Mereka mencoba untuk berjejaring dengan SEKTI (Serikat Tani Independen). Mereka menggunakan wadah yang lebih besar untuk berdemonstrasi dan memperoleh akses agar dapat memasuki arena pemerintahan daerah. Tuntutan SIPER dalam melakukan demonstrasi cenderung stagnan karena tidak terlihat perkembangan pada aksi-aksi yang dilakukan. Tuntutannya hanya berkutat pada permasalahan lahan 332 hektar yang kemudian hari berubah menjadi 20% total lahan milik PTPN Kalisanen dan menolak adanya tarikan-tarikan.

Perang posisi merupakan konsep yang dikemukakan oleh Gramsci dalam bukunya "Catatan-Catatan dari Penjara". Dalam konsep ini Gramsci mencoba untuk menjelaskan pentingnya memberi perhatian pada masyarakat sipil. Perang posisi ini dilakukan dengan lebih memperhatikan persamaan kepentingan dari berbagai macam kelompok sosial yang diakomodir oleh suatu kelas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dominasi dalam bentuk yang lebih halus yaitu sebagai konsesus. Perang posisi tidak hanya ditunjukkan melalui klaim atas tanah saja, namun juga pada hal tuntutan-tuntutan ketika aksi demonstrasi. Tuntutan-tuntutan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak akan memengaruhi pandangan petani dalam melihat pihak mana yang dapat diakui kebenarannya. Di samping itu, kebenaran-kebenaran yang dipertaruhkan akan membentuk hegemoninya di masyarakat pihak mana yang lebih kuat pengaruhnya.

Konflik yang terjadi di antara petani dan PTPN XII Kalisanen mempunyai dinamikanya sendiri. Konflik yang diawali dengan perebutan hak atas kepemilikan tanah lambat laun berkembang menjadi konflik horizontal di antara dua organisasi, SIPER dan WARTANI. Ketiganya saling memperebutkan klaim atas kebenaran pada penguasaan lahan. Lahan yang awalnya dituntut seluas 332 hektar menyusut menjadi 125 hektar dan beberapa tahun selanjutnya malah berkembang tuntutannya seluas 400 hingga 500 hektar terhitung dari 20 persen total lahan PTPN. Ketiga pihak tersebut juga melakukan sebaran informasi yang dapat mengaburkan fakta-fakta sebenarnya di lapangan. Propaganda dilakukan oleh pihak SIPER dan PTPN membuat petani merasa tenang karena mereka tidak harus khawatir tidak memperoleh lahan. Dari sinilah terlihat PTPN XII Kalisanen akan melakukan apapun untuk melakukan klaim atas kepemilikan lahan perkebunan termasuk membeli idealis para petani. Perang posisi antara petani terlihat dengan cara mereka untuk mempertahankan kebenaran hak atas tanah. Petani dengan argumentasinya bahwa tanah-tanah yang saat ini dikuasai oleh PTPN berdasarkan bukti penyerahan tahun 1959 oleh presiden dengan tenang menjelaskan bahwa tanah tersebut awalnya milik petani. Di sisi lain, PTPN menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh petani adalah tindakan ilegal karena tidak dilandasi dengan hukum yang jelas. Meskipun pada akhirnya mereka harus mengakui tanah tersebut bahwa belum diperpanjang pada tahun 1986. Kejadian ini diperparah dengan adanya kesalahan redaksi pada teks pengajuan pada tahun 1999 yang disebutkan adalah Kabupaten Banyuwangi, padahal lahan yang diolah oleh PTPN bertempat di Jember.

d. Peran intelektual dalam konflik

WARTANI merupakan organisasi petani yang berbeda dengan SIPER. WARTANI sebagai organisasi perjuangan petani berusaha untuk selalu mendengarkan setiap keluh kesah petani dan jujur dengan mereka terkait proses perjuangan. Keorganisasian WARTANI terskrutur dengan sistematis dan jelas. Mereka menggunakan ini sebagai kredibilitasnya di mata petani dan pihak luar Curahnongko. Kejujuran dan keterbukaan menjadikannya berbeda dengan SIPER dalam sepak terjang perjuangan hak atas tanah. Selain itu, WARTANI dengan pro aktif melakukan sejumlah variasi gerakan. Mereka berusaha menunjukkan keseriusannya di mata petani agar nantinya cita-cita untuk memiliki lahan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat Desa Curahnongko.

Sebelum kemunculan wadah perjuangan, petani Desa Curahnongko telah terlebih dahulu memiliki aktor-aktor yang berani dan cerdas. Dua aktor tersebut ialah,

Pak Yateni dan Pak Tukirin. Pak Yateni merupakan petani asli Desa Curahnongko yang telah lama berjuang memperebutkan lahannya kembali. Ia juga merupakan salah satu orang dari ketiga orang yang telah lulus pendidikan sarjana. Sedangkan Pak Tukirin warga petani Desa Curahnongko yang merupakan aktor penting dalam setiap aksi-aksi melawan PTPN. Meskipun, Pak Tukirin tidak lulus SD ia termasuk orang yang piawai dan hati-hati dalam melakukan setiap tindakan kepada PTPN.

Pendidikan yang ditempuh Pak Yateni pada waktu kuliah telah meningkatkan pengetahuannya. Masyarakat Indonesia saat masa pemerintahan Orde Baru memiliki minat yang rendah pada pengetahuan. Minimnya petani dalam mendapatkan pendidikan formal terlihat dari kemampuan mereka memahami yang sedang terjadi. Pemikiran petani menjadi sangat berbeda dengan mereka yang telah menempuh pendidikan. Pemikiran orang yang berpendidikan akan berusaha untuk melakukan deteksi permasalahan secara sistematis dan metodis sebelum akhirnya memecahkan masalah tersebut. Pemecahan masalah juga disertakan alasan-alasan yang rasional sehingga nantinya didapatkan penyelesaian yang logis.

Pak Yateni tidak hanya menempuh pendidikan formal saja yang erat kaitannya pada pengembangan pengetahuan umum, namun juga ia masuk dalam partai sebagai pondasi kedua pengetahuannya. Masuknya ia dalam partai bukanlah tindakan yang gegabah. Ia beralasan bahwa dengan masuk dalam partai, maka ia akan semakin mudah untuk mengaspirasikan keinginan petani.

Argumentasi Gramsci tentang intelektual organik tidak terbatas pada kaitannya dengan produksi ekonomi saja, melainkan juga kaitannya dengan produksi kultural. Artinya disini yang menjadi titik tekan dari intelektual Gramsci terletak pada indikatornya tentang kemampuan mengorganisir massa. Oleh karena itu, tiap individu yang memiliki kemampuan ini dapat dikatakan sebagai intelektual organik. Argumentasi Gramsci tentang intelektual terbagi menjadi dua, intelektual tradisional dan intelektual organik. Pengertian pertama dijelaskan oleh Gramsci bahwa individu yang “hanya” memiliki pengetahuan saja namun pengetahuan tersebut tidak digunakan dalam mengorganisir massa maka dapat dikatakan ia merupakan intelektual tradisional. Intelektual organik pada struktur badan pengurus harian (BPH) yang tersusun dari ketua, sekretaris dan bendahara memainkan peran cukup vital. Mereka akan saling berkoordinasi agar nantinya gerakan yang dilakukan lebih massif dan mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan. Ketua organisasi yaitu Pak Yateni berperan sebagai penghubung antara organisasi dengan jaringan-jaringannya baik dalam lingkup daerah maupun nasional. Posisi sekretaris dan bendahara tak kalah pentingnya dalam memaksimalkan intelektual organik di organisasi. Masing-masing berperan sebagai penghubung dengan organisasi atau kepala pemerintahan daerah dan sebagai perantara ide gagasan yang akan ditransfer kepada koordinator lapangan serta anggota. Intelektual organik WARTANI tidak hanya terletak pada seorang ketua saja melainkan juga pada sisi lainnya, salah satunya koordinator lapangan. Koordinator lapangan berperan penting dalam massifnya gerakan yang dilakukan oleh WARTANI. Selain karena mereka mendapatkan transfer pengetahuan yang begitu melimpah dari ketua organisasi mereka juga berperan dalam mengupayakan jumlah massa dalam aksi demonstrasi.

Peran intelektual tidak hanya sebatas dalam organisasi saja tapi juga memenangkan perang posisi. Keterlibatan para intelektual telah dijelaskan oleh Gramsci bahwa kaum pekerja tidak bisa berjuang sendiri dalam membentuk intelektual organik melainkan juga harus berhubungan dengan elit. Artinya disini elit tidak

hanya melekat pada penguasa saja melainkan individu-individu yang memiliki sikap kepemimpinan. Kepemimpinan dalam kerangka Gramsci ditunjukkan dengan adanya pemikiran kritis yang diartikan secara politik dan historis. Gramsci juga berupaya untuk menjelaskan bahwa pembentukan intelektual itu membutuhkan waktu yang lama sehingga dibutuhkan kesabaran dalam melakukannya. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam perkembangan WARTANI hingga hari ini Pak Yateni sebagai pemimpin telah menempuh perjalanan intelektualnya mulai dari pendidikan di universitas hingga masuk dalam partai politik. Pendidikan ini telah membentuk pengetahuannya sehingga mampu mencetuskan ide-ide yang strategis. Di samping itu ia juga merupakan penduduk asli Desa Curahnongko sehingga ia telah mengetahui dinamika perjalanan perlawanan petani di sana. Pembentukan intelektual pada petani juga tidak mudah. Waktu yang dapat ditunjukkan adalah 24 tahun perjuangan masih ada petani yang masih sering kebingungan kebenaran mana yang harus diikuti. Oleh karena itu, peran WARTANI penting disini dalam upayanya menyadarkan kepada petani bahwa mereka telah dibohongi. WARTANI juga tidak mengedukasi anggotanya melainkan orang-orang di luar organisasi seperti akademi, birokrat dan lainnya. Mereka berupaya keras agar petani dapat memenangkan sengketa ini. Argumentasi tentang kesejahteraan dan kebersamaan selalu didengungkan WARTANI. Argumentasi ini juga diejawantahkan dalam organisasi berbentuk kegiatan-kegiatan perjuangan. Para petani bahkan tidak diwajibkan untuk membayar iuran apabila mereka memang sedang mengalami kendala ekonomi. Di samping itu demi menghindari anggapan umum bahwa organisasi perjuangan selalu berkaitan dengan iuran-iuran yang tak jelas arahnya, mereka kerap kali menggunakan uang pribadi ketika melakukan perjalanan ke Jakarta. Peran intelektual WARTANI selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar meningkatnya pengetahuan petani tentang perjuangan agraria.

Kesimpulan

Dalam upaya untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini penulis memaparkan melalui beberapa pembagian yaitu, perang posisi petani dengan PTPN dan gerakan intelektual WARTANI dalam perang posisi dengan PTPN. WARTANI sebagai organisasi yang digunakan sebagai wadah perjuangan petani memainkan peran sentral melawan PTPN. Mereka tidak lagi menggunakan strategi perlawanan langsung yang malah akan berujung pada kegagalan tiada ujung. Melainkan melakukan perang posisi dengan PTPN.

Gerakan intelektual dalam bentuk wadah organisasi WARTANI telah membawa dampak yang progresif kepada perjuangan. Hal ini tidak terlepas dari peran-peran yang digunakan secara penuh oleh WARTANI dalam memberikan pengetahuan baik kepada anggotanya maupun pihak luar. Peran intelektual organik dari WARTANI telah memaksimalkan sejumlah perlawanan-perlawanan dalam bentuk aksi turun jalan yang mereka lakukan. Para petani berhasil mendatangkan massa yang tidak sedikit untuk mengepung lembaga-lembaga terkait dengan permasalahan agraria. Tidak hanya itu intelektual organik juga berperan dalam memasifkan peran politiknya dengan melakukan komunikasi-komunikasi jaringan OTL lain di Jember dan pihak-pihak yang terlibat dengan agraria seperti Arif Wibowo, Sekretaris Daerah Jember, Seknas Jokowi dan Bu Faidha. Jaringan ini yang nantinya digunakan oleh WARTANI untuk memperkuat posisinya di Jakarta. Selain itu peran WARTANI tidak berhenti disitu mereka juga memainkan peran penting dalam membentuk hegemoni di masyarakat. Mereka memberikan pemahaman-pemahaman tentang yang terjadi sebenarnya. Hegemoni ini kemudian juga diperkuat oleh WARTANI melalui keterbukaannya dengan masyarakat.

Mereka dengan senang hati menerima pihak luar baik dari kalangan akademisi, budayawan, politisi, pejabat BPN dan lainnya. Melalui hal tersebut yang kemudian menjadikan WARTANI bukan semata-mata sebuah gerakan perjuangan tanah saja melainkan juga suatu gerakan yang tersistematis dengan baik oleh peran intelektual di dalamnya.

Saran

1. Lembaga yang berkaitan dengan jalannya Agraria seperti BPN mampu untuk menghindari segala bentuk manipulasi dari berbagai pihak. Hal ini ditunjukkan sebagai keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang dalam hal ini petani.
2. Penulis mengharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh WARTANI sebaiknya lebih massif digalakkan. Hal ini ditunjukkan untuk semakin memperkuat posisi WARTANI di Desa Curahnongko sehingga dukungan dari berbagai pihak dapat meningkat.

Daftar Pustaka

- Aprianto, T. C. (2016). *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember*. Yogyakarta: STPN PRESS.
- Fauzi, N. (1999). *Petani dan Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Moleong, P. D. (2016). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- redaksi. (2021, Agustus 24). *Bersama KSP, Sekti Temui Wabup Desak Penyelesaian Kasus Tanah Curahnongko*. Retrieved from lenteratoday.com: <https://lenteratoday.com/bersama-ksp-sekti-temui-wabup-desak-penyelesaian-kasus-tanah-curahnongko/>
- Seknas, R. (2017, September 24). *WARTANI CURAHNONGKO MINTA BUPATI JEMBER BENTUK TIM VIRIFIKASI REDISTRIBUSI 332 HA OBYEK TORA*. Retrieved from [seknaejokowi.or.id](https://www.seknaejokowi.or.id): <https://www.seknaejokowi.or.id/berita/wartani-curahnongko-minta-bupati-jember-bentuk-tim-virifikasi-redistribusi-332-ha-obyek-tora/>
- Simon, R. (2004). *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan INSIST.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Suseno, F. M. (2017). *Dalam Bayang-Bayang Lenin Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syahrum, & Salim. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Yuswadi, H. (2005). *Melawan Demi Kesejahteraan Perlawanan Petani Jeruk terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Jember: Kelompok Peduli Budaya dan Wisata Daerah Jawa Timur.
- Yuswadi, H. (2022). *Pola Resistensi: Variasi dan Struktur Resistensi Petani di Pedesaan*. Jember: Media Cipta Perkasa.

Zein, S. (2019). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 121-135.